

Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Koperasi Bona Mandiri Jaya

Eti Damayanti Simamora, Riphod Delzy Perkasa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

etidamayantisimamora@gmail.com, riphodelzyperkasa@uinsu.ac.id

ABSTRACT

In order to create the implementation of regional autonomy policies, especially in increasing cooperatives, of course, it must empower micro and small businesses which are of particular concern in this use. In line with the existence of regional autonomy policies in the implementation of cooperatives, of course it involves the existence of a property business to determine the quality of the implementation of these cooperatives so that they are able to provide the best competitiveness for the community. The research design used in this research is qualitative where the researcher acts as a key instrument in the research supported by data collection techniques using triangulation or combined research

Keywords: Implementation, Development, Cooperative, UMKM

ABSTRAK

Dalam rangka menciptakan implementasi kebijakan otonomi daerah terutama dalam peningkatan koperasi tentunya harus memperdayakan usaha mikro kecil yang menjadi perhatian khusus dalam penggunaan tersebut. Sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan koperasi tentunya melibatkan adanya usaha properti untuk menentukan kualitas penyelenggaraan koperasi tersebut agar mampu memberikan daya saing terbaik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan UMKM pada bidang koperasi. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian tersebut didukung oleh teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi atau penelitian gabungan

Kata kunci: Penerapan, Perkembangan, Kooperatif, UMKM

PENDAHULUAN

Sasaran program pengembangan dalam memindah institusi koperasi tentunya berkaitan erat dengan bagaimana terwujudnya pemberdayaan koperasi tersebut di tengah masyarakat. (Fikrman et al., 2021) implementasi mengenai kebijakan otonomi daerah tentunya menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan koperasi tersebut sehingga mampu menciptakan kepentingan masyarakat yang adil dan tentunya menyejahterakan ekonomi masyarakat yang ada di daerah

tersebut (Muammar, 2021).

Dalam rangka menciptakan implementasi kebijakan otonomi daerah terutama dalam peningkatan koperasi tentunya harus memperdayakan usaha mikro kecil yang menjadi perhatian khusus dalam penggunaan tersebut. Sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan koperasi tentunya melibatkan adanya usaha properti untuk menentukan kualitas penyelenggaraan koperasi tersebut agar mampu memberikan daya saing terbaik bagi masyarakat.

Faktor penyebab penyelenggaraan koperasi tidak berjalan baik di tengah-tengah masyarakat yaitu disebabkan oleh karena pelaksanaan rapat anggota tahunan dari Presiden tersebut belum memenuhi kegiatan usaha sehingga Hal inilah yang menyebabkan hasil laporan kegiatan mendapatkan kualitas yang rendah dan tentunya pengeluaran koperasi menjadi perlu adanya perhatian khusus untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang seimbang dan tepat sasaran.

Keadaan ini juga menjadi salah satu bentuk klasikal Di mana penjualan Koperasi UKM belum menciptakan kualitas yang sempurna antara lain ditunjukkan yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh UMKM tersebut sehingga perlu adanya pemberhentian khusus dalam bidang organisasi dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan pemasaran. Penyebab lainnya yaitu lemahnya kewirausahaan yang dimiliki oleh para pelaku koperasi ataupun umpan tersebut dan terbatasnya akses Koperasi untuk memberikan modal dan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan UMKM pada bidang koperasi.

METODE PENELITIAN

Desain pengantin yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian tersebut didukung oleh teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi atau penelitian gabungan sehingga mendapatkan hasil analisis yang bersifat induktif sesuai sasaran dengan demikian akan mendapatkan hasil analisis penelitian yang bersifat generalisasi. Penelitian ini juga menekankan kepada Bagaimana prosedur penyuntingan yang tepat untuk mengumpulkan data melalui hasil observasi dokumentasi, dan juga wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil militer menunjukkan bahwa kebijakan merupakan arahan dan juga kaidah yang sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan pedoman penelitian yang tepat di mana tentunya ini ditujukan berdasarkan ketentuan asas dasar pentingnya koperasi yang harus diselenggarakan oleh peraturan pemerintah ataupun pegawai. Kebijakan yang dimaksud tentunya yaitu berisikan beberapa istilah yang mengarah kepada tujuan dan program serta beberapa keputusan terkait dengan undang-undang yang ada.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan indikator terpenting yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas peningkatan UMKM melalui Koperasi di tengah-tengah masyarakat di mana hal ini merupakan salah satu program yang cukup sempurna untuk mengawasi Bagaimana tindakan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dalam ekonomi masyarakat sehingga tidak lagi terciptanya sebuah asumsi bahwasanya peningkatan ekonomi hanya ditujukan kepada kalangan masyarakat atas.

Selain itu sumber daya manusia juga diimplementasikan melalui beberapa program pengembangan seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya koperasi kemudian meningkatkan usaha kecil yang dimiliki masyarakat tersebut agar mendapatkan pendapatan yang jelas setiap bulannya sehingga tentunya hal ini tidak akan menyurutkan rasa semangat pada diri masyarakat untuk Mandiri dan mengembangkan bisnis.

Sistem masih agak pelaksanaan

Dalam pengimplementasian setiap program pengembangannya juga pelaksanaan UMKM dalam bidang koperasi tentunya ditentukan oleh beberapa pusat program pengembangan yang ada titik antara lain yaitu karakteristik tersebut didukung oleh usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi dalam menciptakan kegiatan masyarakat dan juga anggotanya serta mengaitkan beberapa kerja sama antara lembaga formal atau informal dengan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut

Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Kesiapan para pelaksana kebijakan pengembangan program tidak dapat memilih untuk tidak bersedia melaksanakan tugas. Loyalitas sebagai pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan arahan pimpinan dan terlaksananya program tersebut. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

KESIMPULAN

Tengah-tengah masyarakat tentunya diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sempurna sehingga hal ini tentunya dapat menciptakan perekonomian yang tepat sasaran pada koperasi dan juga usaha kecil menengah dalam segala hal bidang perdagangan. Adapun Tingkat keberhasilan pada program peningkatan usaha dan koperasi tersebut tentunya untuk memberikan media kepada masyarakat agar dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya secara maksimal.

Pada setiap kelembagaan koperasi tentunya diberikan arahan kepada masyarakat untuk membuat Bagaimana laporan keuangan setiap bulannya, Sehingga dalam hal ini pemerintah dapat meninjau untuk seberapa banyak hasil peningkatan yang dilakukan masyarakat dalam pengembangan usaha tersebut melalui koperasi yang disediakan.

Faktor pendorong yang menjadi implementasi kebijakan pengembangan koperasi melalui usaha kecil masyarakat di antaranya yaitu menerapkan beberapa kebijakan seperti halnya:

1. Memberikan daya sayang kepada masyarakat untuk meningkatkan pengembangan perekonomiannya dengan cara meningkatkan taraf pendapatan masyarakat tersebut
2. Memberikan respons yang baik kepada masyarakat tentang peran penting dari koperasi untuk membantu pemberian dana dan juga dukungan dalam meningkatkan usaha yang
3. Menampung aspirasi masyarakat dalam pengembangan usaha sehingga dapat tumbuh menjadi masyarakat yang mandiri

DAFTAR PUSTAKA

Fikriman, F., Mita, F. K., & Setiono, S. (2021). The Role of Cooperatives as a Source of Facilitators in the World of Agriculture. *Baselang*, 1(2), 92–98.

Firdaus, M. A., Ristiawati, R., & Saphira, S. (2021). Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin. *Jurnal IusConstituendum*, 6(2), 424–441.

Firmando, H. B. (2021). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pengembangan Sektor Perdagangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Tapanuli Utara). *AT- TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 107–131.

Hermawati, F. (2021). *Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Perspektif Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2014*. UIN SMH BANTEN.

Muammar, N. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Bontossunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum IusQuia Iustum*, 25(1), 198–215.

Ryan, J. (2021). *Relasi Pusat Dan Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19: Studi Tentang Tarik Menarik Kepentingan Di Provinsi DKI Jakarta*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Salamun, A. (2022). Evaluasi Program Pemberdayaan pada Yayasan Baitul Hikmah dengan Model Context-Input-Proses-Product. *Reslaj: Religion Education Social LaaRoiba Journal*, 4(1), 85–100.